PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PEDESAAN MENJADI RUMAH CERDAS

Oleh:

Lasa Hs.

Yogyakarta
Juli 2005

Kata Pengantar

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, berkat ridha dan hidayah Allah SWT, tulisan berjudul *Pengembangan Perpustakaan Pedesaan Menjadi Rumah Cerdas* ini dapat kami selesaikan. Atas selesainya tulisan ini disampaikan terima kasih kepada :

1. Jurusan Manajemen Informasi & Perpustakaan FISIPOL UGM yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengasuh mata kuliah Perpustakaan Umum & Khusus di jurusan tersebut.
2. Para mahasiswa, peserta penataran, pemerhati perpustakaan, para dosen, pustakawan, dan peminat tulisan-tulisan saya yang tercetak maupun yang muncul di internet. (Google – Lasa Hs).

Semoga ide dan tulisan-tulisan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dikembangkan lebih lanjut dalam pemberdayaan perpustakaan pada umumnya.

Atas saran dan kritikannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2005

Lasa Hs.

I. PENDAHULUAN

Konsep Perpustakaan

Konsep perpustakaan mengalami perubahan sesuai perkembangan teknologi informasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat .Semula perpustakaan berarti sebagai tempat menyimpan buku, diolah, lalu dipinjamkan. Kini pengertian itu telah berubah menjadi suatu sistem informasi yang dalam kegiatannya terdapat unsur-unsur pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan pemberdayaan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, kultur masyarakat, dan teknologi informasi, maka pengertian perputakaan juga menglami perkembangan. Konsep perpustakaan menurut Sulistya-Basuki (1993: 3) adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Dalam pengertian ini perpustakaan diidentikkan dengan ruangan, koleksi, penyimpanan, dan pemanfaatan. Sebagai lembaga keilmuan, perpustakaan dalam hal ini tidak disyaratkan harus dikelola oleh tenaga terdidik.

Namun demikian, sesuai perkembangan akhir-akhir ini, perpustakaan perlu dipahami bukan sekedar sebagai lembaga yang mengelola buku dan terbitan lainnya. Akan tetapi juga mengelola sumber-sumber informasi lain dan informasinya itu sendiri dengan menggunakan teknologi informasi. Maka disinilah perlunya tenaga yang menguasai keahlian dan ketrampilan tersendiri. Oleh karena itu Lasa Hs dalam buku Kamus Istilah Perpustakaan (1998) menyatakan bahwa perpustakaan adalah sistem informasi yang di

dalamnya terdapat kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sumber informasi untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Kemudian dalam pengelolaannya diperlukan tenaga terdidik bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Dalam pengertian ini, perpustakaan dititikberatkan pada sistemnya yang tentunya termasuk sumberdaya manusia, koleksi, tempat, dan seperangkat sistem yang mengaturnya. Pengertian ini didasarkan pada pemikiran bahwa perpustakaan sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan dan informasi yang selalu berkembang seirama dengan perkembangan pemikiran dan kultur masyarakatnya.

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (1990: 112), perpustakaan diartikan sebagai kumpulan buku yang tersimpan di suatu tempat tertentu milik suatu instansi tertentu. Perpustakaan modern masa kini juga menyediakan video, film, kaset, piringan hitam, dan sebagainya. Dalam pengertian ini perpustakaan terbatas pada sejumlah bahan pustaka (bahan buku dan bahan nonbuku) yang dimiliki oleh suatu lembaga swasta atau pemerintah. Disini tidak dicakup perpustakaan milik perorangan yang dalam realita memang ada dan memiliki spesifikasi bidang yang sangat urgen dalam pengembangan bidang misalnya, Perpustakaan dan Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, dan lainnya.

Sesuai perkembangan dan keadaan, maka pengertian perpustakaan menurut SK MENPAN No.: 132 tahun 2002 adalah: unit kerja yang memiliki sumberdaya manusia sekurang-kurangnya seorang pustakawan, ruang/tempat khusus dan koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya 1.000 judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis dan misi perpustakaan yang

bersangkutan serta dikelola menurut sistem tertentu untuk kepentingan masyarakat penggunanya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa suatu unit kerja, baru pantas disebut perpustakaan apabila memiliki:

1. Sumber daya manusia minimal berpendidikan diploma perpustakaan
2. Ruang/tempat
3. Minimal 1.000 judul bahan pustaka dari berbagai jenis pengetahuan
4. Sistem pengolahan yang baku
5. Dimanfaatkan oleh masyarakat

Dalam perkembangan nantinya sumber informasi yang berupa kertas akan digantikan oleh elektronik, CD, software dan lainnya. Hal ini merupakan perkembangan yang tak terelakkan lagi. Perkembangan perpustakaan elektronik ini dalam waktu dekat diharapkan tidak menggeser fungsi perpustakaan konvensional. Sebab perubahan yang mendadak akan menimbulkan kejutan budaya/*shock culture* pada masyarakat. Namun demikian, harus diakui pula bahwa memang terdapat sisi positif dari adanya perpustakaan elektronik ini antara lain:

1. Informasi dapat diakses dari jarak jauh. Dengan demikian akan lebih menghemat tenaga, waktu, dan beaya
2. Informasi yang disediakan oleh perpustakaan dan pusat informasi dapat digunakan oleh dua orang atau lebih
3. Informasi itu dapat digunakan lebih dari satu kepentingan.

Seirama dengan perkembangan komputer, kini telah muncul perpustakaan digital/*digital library* yang dalam perkembangannya nanti akan membantu penelusuran dan penyebaran ilmu pengetahuan lebih luas dan lebih cepat. Namun demikian, di satu sisi dikhawatirkan akan menggeser fungsi

perpustakaan konvensional. Padahal jumlah perpustakaan konvensional ini cukup banyak.

Pengertian tentang perpustakaan oleh pustakawan dan ahli komputer agak berbeda. Sedangkan pengertian perpustakaan antar pustakawan sendiri juga berbeda. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan adanya dinamisasi di kalangan pustakawan dan adanya perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagian pustakawan mmemaknai perpustakaan difokuskan pada insitusi, tempat, ruang, atau lembaga yang mengelola koleksi. Sedangkan para ahli komputer memaknai perpustakaan difokuskan pada koleksinya. Jadi institusi itu merupakan bagian kecil saja. Namun demikian bagi kedua ahli bidang itu (antara pustakawan dan ahli komputer) memiliki persepsi yang sama bahwa perpustakaan merupakan media komunikasi keilmuan.

Pengartian perpustakaan menurut David M. Levy (Xerox Palo Alto Research Centre) dalam Konferensi ACM Digital Libraries 1999 menyatakan bahwa perpustakaan digital adalah salah satu elemen dalam sirkuit besar yang menyangkut lewat cara bagaimana informasi itu harus mengalir dari mulai proses produksi informasi sampai informasi itu siap dikonsumsi.

B. Perpustakaan Sebagai Organisasi Pelayanan Lingkungan/Environmental Service Organization/ESO

Perpustakaan sebagai organisasi nonprofit dapat diarahkan pada orientasi pada keuntungan bahkan sangat mungkin menjadi organisasi bisnis. Untuk itu, perlu adanya redefinisi tentang konsep perpustakaan, perubahan visi dan misi, dan struktur organisasi yang mampu menyakup fungsi-fungsi produksi, hubungan kerjasama, pemasaran, dan ketenagaan.

Perpustakaan sebagai organisasi publik memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat umum dengan mengutamakan kepuasan pelanggan/*customer satisfication.* Hal ini berbeda dengan organisasi bisnis yang juga memberikan layanan umum, namun dalam pelayanan ini diutamakan pada konsumen yang memberikan keuntungan. Namun demikian diantara organisasi profit dan nonprofit terdapat kesamaan tugas yakni melayani lingkungan. Dengan demikian, perpustakaan dapat dikategorikan sebagai organsasi dalam kelompok Environmental Service Organization/ESO seperti halnya rumah sakit, perguruan tinggi, rumah yatim piatu, maupun badan-badan pemerintahan. Sebagai organisasi pelayanan yang dalam operasionalnya memerlukan dana yang dapat diperoleh dari pemerintah dan sumbangan masyarakat. Maka tidaklah berlebihan apabila perpustakaan mengutip beaya dari masyarakat pemakai dalam batas-batas kewajaran. Sebb pada dasarnya perpustakaan sebagai organisasi nonprofit boleh memperoleh keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini Oleck dalam Salusu (1998) memberikan batasan bahwa organisasi nonprofit boleh mengambil dana dari masyarakat dengan alasan:

1. *Public benefit;* yakni dana itu merupakan keuntungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum seperti halnya sekolah, museum, dan rumah sakit;
2. *Mutual benefit;* yakni keuntungan/dana yang diperoleh itu merupakan keuntungan yang dinikmati bersama-sama oleh seluruh anggota organisasi nonprofit seperti halnya terjadi pada koperasi, organisasi profesi, dan kelompok tertentu

3. *Private benefit*; yakni organisasi itu mengutip dana dari masyarakat sekedar beaya operasional dan tidak mencari keuntungan secara berlebihan yang tentunya tidak sama dengan organisasi bisnis.

C.Perpustakaan Sebagai Lembaga Nirlaba

.Perpustakaan sebagai lembaga informasi yang dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat tidak menitikberatkan pada pencarian materi. Namun dalam pencapian tujuannya, perpustakaan harus sama dengan organisasi lain yang berorientasi pada keuntungan antara lain dengan menerapkan filosofi dan prinsip-prinsip promosi. Sebab perpustakaan dalam memberikan pelayanan itu pada hakekatnya adalah memberikan produk yang berupa jasa. Maka perpustakaan dapat dikatakan sebagai lembaga yang membantu orang-orang yang datang untuk memanfatkan jasanya (Wisdom, 1974). Menurut pengertian ini, dapat dikatakan bahwa perpustakaan tidak dikatakan sebagai lembaga pencari laba/keuntungan. Akan tetapi lebih mengutamkan pada pelayanan.

Apabila ditinjau dari segi penghasilan dan sifat pengendalian, maka lembaga nonlaba dapat dibagi menjadi:

1.Sisi donatif, yakni suatu lembaga yang penghasilan atau penerimaannya berasal dari sumbangan/donasi. Contoh lembaga dalam kategori ini antara lain; yayasan keagamaan, Palang Merah Indonesia, yayasan sosial, lembaga anak jalanan, yayasan santunan pendidikan, dan lainnya;

2.Sisi komersial, yakni suatu lembaga yang penghasilan atau penerimaannya berasal dari pembayaran masyarakat atau berdasarkan pelayanan yang diberikan. Lembaga yang dapat dikategorikan dalam kelompok ini antara lain; toko, mall, biro perjalanan, biro jasa, dan lainnya

3.Sisi bersama, yakni suatu lembaga yang memiliki penghasilan yang diperoleh dari usaha sendiri dan juga disokong oleh masyarakat. Lembaga dalam kaategori ini antara lain; lembaga pendidikan (termasuk perpustakaan), rumah sakit pendidikan, dan lainnya

4.Sisi kewirausahaan, yakni suatu lembaga yang manajemennya dikendalikan oleh profesional atau wiraswastawan yang dalam operasionalnya bersifat independen. Lembaga dalam kategori ini antara lain adalah; pabrik, perusahaan, industri, dan lainnya.

Meskipun perpustakaan sebagai lembaga yang tidak mengejar keuntungan materi, namun dalam pengelolaannya harus ditangani secara profesional karena menyangkut kemajuan msyarakat dan peningkatan sumber daya manusia. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam pengendalian organisasi harus dilakukan secara independen dengan wewenang dan tanggung jawab penuh. Dari pemikiran inilah sebenarnya perpustakaan dapat dikembangkan menjadi lembaga komersial karena meningkatnya kebutuhan informasi oleh masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemikiran ini juga didasarkan adanya persaingan yang ketat akhir-akhir ini. Untuk itu perlu diidentifikasi tingkat persaingan di masa mendatang yang menurut Kotler (1991) persaingan itu dibagi menjadi:

a.Persaingan hasrat

Yakni bentuk persaingan antar individu atau kelompok dalam pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, atau tersier seperti makan, perlindungan, rekreasi, dan lainnya. Persaingan hasrat ini apabila tidak dapat dikendalikan bisa mendatangkan konflik antar individu atau antar kelompok;

b.Persaingan generik

Yakni bentuk persaingan antar individu atau kelompok dalam pemenuhan kebutuhan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan seperti membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi, menyaksikan konser, dan lainnya. Dalam persaingan ini sering terjadi keributan antar kelompok bahkan sering terjadi korban

c.Persaingan bentuk

Yakni bentuk persaingan dalam pemenuhan kebutuhan ilmu pengetahuan dengan cara tertentu, misalnya dengan diskusi, membaca dan belajar di perpustakaan, browsing melalui internet, dan lainnya

d.Persaingan merek

Yakni bentuk persaingan dalam pemenuhan kebutuhan ilmu pengetahuan atau kebutuhan lain dengan cara memanfatkan fasilitas yang telah punya nama. Misalnya, belanja untuk kebutuhan rumah tangga itu sebenarnya dapat saja dilakukan di pasar atau di toko-toko kecil. Nah, dengan adanya persaingan merek ini lalu seseorang belanja di mall-mall terkenal. Demikian pula halnya dalam upaya penambahan ilmu pengetahuan dengan membaca atau belajar di perpustakaan-perpustakaan besar dan yang telah punya nama.

Seirama dengan kemajuan jaman dan merebaknya globalisasi, maka di masa mendatang akan terjadi persaingan yang ketat terutama pada tingkatan generik dan persaingan bentuk. Oleh karena itu perpustakaan sebagai lembaga nir laba perlu memahami gejolak ini dan ada usaha penyesuaian diri dengan berbagai kemungkinan yang terjadi.

II. PERPUSTAKAAN UMUM

Untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan mereka, maka kini telah berkembang berbagai macam perpustakaan. Maka ada perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan umum.

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu perpustakaan umum ini memiliki karakteristik:

a. Terbuka untuk umum

b. Dibeayai oleh masyarakat

c. Jasa informasi yang diberikan pada umumnya bersifat gratis.

Pada dasarnya keberadaan perpustakaan umum di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan untuk:

1.Memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik

2.Menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat, dan murah bagi masyarakat, terutama informasi mengenai topik yang sedang menarik masyarakat

3.Membantu masyarakat dalam pengembangan potensi diri dan potensi masyarakat pada umumnya

4.Berfungsi sebagai agen kultural dengan perannya untuk menumbuhkan apresiasi budaya masyarakat setempat.

(Sulistya-Basuki, 1993)

Perpustakaan umum ini merupakan unit/satuan kerja, badan atau lembaga yang diselenggarakan di pemukiman penduduk perkotaan dan pedesaan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat setempat. Oleh karena itu, masyarakat yang memanfaatkan koleksi itu tidak perlu dibatasi jenis kelamin, golongan, pendidikan, aliran politik, ras, suku, dan lainnya. Kemudian untuk melancarkan tugas dan kegiatan kepustakaan diperlukan struktur organisasi, sumber daya manusia, koleksi, gedung/ruang, anggaran, dan sarana dan prasarana.

Perpustakaan umum dapat terdiri dari Pperpustakaan Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kota, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa/Kalurahan. Sesuai Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Umum (1999), maka kebutuhan ruangan masing-masing diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Perpustakaan Umum	Luas Tanah	Luas Bangunan
1.	Perpustakaan Daerah Tk. II/ Kabupten/Kota	2.000 m2	200 m2
2.	Pperpustakaan Kecamatan	1.000 m2	120 m2
3.	Perpustakaan Desa/Kalurahan	500 m2	80 m2

Sumber : Perpustakaan Nasional RI, 1999

Macam

Apabila dirunut lebih jauh, maka perkembangan perpustakaan umum di Indonesia memiliki banyak corak. Ada yang berdiri atas prakarsa masyarakat seperti perpustakaan tempat ibadah, perpustakaan PKK, dan perpustakaan karang taruna. Ada pula yang disponsori oleh perusahaan seperti yang akhir-akhir ini dikembangkan oleh Yayasan Cocacola Indonesia dan PT Sampoerna. Ada pula

yang didirikan oleh suatu yayasan seperti Perpustakaan Yayasan Hatta, Perpustakaan Islam, Perpustakaan Taman Mini Indonesia Indah, dan lainnya. Ada pula perpustakaan yang didirikan atas prakarsa pemerintah pusat maupun daerah seperti perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, perpustakaan kabupaten, dan perpustakaan kecamatan/desa, perpustakaan rakyat, dan dulu ada perpustakaan negara.

1.Perpustakaan Rakyat.

Yakni perpustakaan yang diselenggarakan oleh Departemen P dan K (kini Depdiknas) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. No. 7870/Kab. Tanggal 5 Maret 1957. Penyelenggaraan perpustakaan ini dimaksudkan untuk :

a.Menghidupkan dan memelihara minat dan hasrat rakyat Indonesia untuk membaca dan belajar mandiri

b.Mempertinggi dan memperluas pengetahuan, kecerdasan, dan kesadaran rakyat

c.Mempertinggi dan memperluas akhlak rakyat.

Jenis-jenis

Adapun jenis-jenis perpustakaan rakyat ini adalah:

a.Tipe A, yakni koleksinya ditujukan untuk mereka yang berpendidikan sekolah rakyat/dasar atau yang sederajat, ditempatkan di tiap kecamatan

b.Tipe B, yakni perpustakaan yang koleksinya diperuntukkan bagi mereka yang berpendidikan SLTP atau yang sederajat, dan ditempatkan di tiap kabupaten

c.Tipe C, yaitu perpustakaan yang koleksinya dititikberatkan bagi masyarakat yang berpendidikan minimal SLTA atau yang sederajat, dan ditempatkan di ibukota propinsi.

Jenis-jenis perpustakaan tersebut lamban berkembang karena lemahnya sumberdaya manusia, miskin dana, perubahan politik, dan ada beberapa jenis yang sudah tutup.

2.Perpustakaan Nasional RI

Tiap negara memiliki perpustakaan nasional yang bertugas untuk mengembangkan dan membina perpustakaan bahkan diharapkan berfungsi sebagai deposit karya-karya warga negara.

Perpustakaan Nasional RI merupakan perpaduan antara Perpustakaan Nasional dengan struktur lama dan telah berdiri sejak tahun 1980 dan Pusat Pembinaan Perpustakaan yang antara lain membawahkan Perpustakaan Wilayah (kini Badan Perpustakaan Daerah/BPD). Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Presiden, kedua lembaga ini berada di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Koleksi awal Perpustakaan Nasional RI berasal dari Perpustakaan Nasional (struktur lama), Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Politik dan Sosial, Bidang Bibliografi dan Deposit, dan Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta. Gedung yang berlokasi di Jl. Salemba Raya 28 Jakarta Pusat itu dulu diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 11 Maret 1989. Pembangunan gedung itu diprakarsai oleh Ibu Suhartinah (Tien Soeharto) dengan dana dari Yayasan Harapan Kita. Adapun Kepala Perpustakaan Nasional RI pertama kali adalah Ibu Mastini Hardjaprakosa M.Ls. yang dilantik oleh Menteri/Sekretaris Negara Moerdiono atas nama Presiden pada tanggal 17 Mei 1990. Kemudian setelah Ibu Mastini Hardjaprakosa M.Ls purna tugas, lalu kedudukannya digantikan oleh Drs. Hernandono, M.Ls.

Perpustakaan Nasional RI merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Dengan demikian, Kepala Perpustakaan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Perpustakaan Nasional RI didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 11 Tahun 1989 dan direvisi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1997 tanggal 29 Desember 1997. Dalam Keputusan Presiden yang terakhir ini dinyatakan bahwa Perpustakaan Nasional RI memiliki tugas pokok yakni membantu Presiden dalam meenyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah maupun swasta dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya serta pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Dalam peningkatan sumberdaya manusia, Perpustakaan Nasional juga berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan dan latihan, dan pembinaan sumberdaya manusia di bidang perpustakaan. Oleh karena itu di perpustakaan ini sering diselenggarakan pelatihan-pelatihan tingkat dasar, tingkat lanjut atau pelatihan dalam bidang-bidang tertentu yang terkait dengan kepustakawanan.

Perpustakaan Nasional RI dalam tugasnya memberikan pelayanan informasi, menyelenggarakan pelayanan informasi sebagai berikut:

1. Jasa Perpustakaan;
2. Jasa Informasi;
3. Jasa Bibliografi;
4. Jasa Rujukan;
5. Jasa KDT/ISBN;
6. Jasa Reproduksi dan Penjilidan
7. Jasa Pelatihan;
8. Jasa Terjemahan

9. Jasa Konsultasi

Disamping itu, Perpustakaan Nasional RI juga memiliki koleksi yang lengkap tentang Indonesia karena juga berfungsi sebagai Lembaga Deposit Nasional. Oleh karena itu, perpustakaan ini memiliki koleksi monograf sejak abad ke 16, koleksi majalah dari abad ke 18, serta bahan rujukan sejak abad ke 17.

Perpustakaan ini juga menyimpan penerbitan PBB dan badan bawahannya, naskah kuno, disertasi sejak abad ke 18, peta dari abad ke 12, lukisan kuno (bentuk kertas), bentuk mikrofis, film mikro, dan koleksi yang ditulis dengan huruf Braille.

Untuk mengkomunikasikan informasi dan koleksi yang dimilikinya, Perpustakaan Nasional juga menerbitkan beberapa literatur skunder antara lain berupa katalog, bibliografi, dan indeks. Katalog yang diterbitkannya antara lain; Katalog Induk Nasional, Katalog Peta, Katalog Surat Kabar, Katalog Terbitan Pemerintah, Katalog Sejarah, dan lainnya. Bibliografi yang diterbitkannya antara lain; Bibliografi Nasional Indonesia/BNI, Bibliografi Hukum di Indonesia, Bibliografi Pendidikan Indonesia. Adapun indeks yang diterbitkannya aantara lain; Indeks Terjemahan, Indeks Pemilihan Umu, Indeks Berita dan Artikel Surat Kabar, Indeks Beranotasi Terbitan PBB Tentang Indonesia.

III. KONSEP RUMAH CERDAS

Pemikiran ini sebenarnya merupakan usaha pengembangan perpustakaan umum terutama perpustakaan kecamatan/desa menjadi komunitas yang hidup, mampu menggerakkan potensi masyarakat, dan berfungsi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini tiap warga masyarakat berkesempatan mengekspresikan diri, menyampaikan keahlian dan ketrampilannya kapada orang lain. Di rumah cerdas ini masyarakat saling asah, saling asuh, dan saling asih untuk meningkatkan kualitas diri.

Berkembangnya pemikiran ini didasarkan pada berbagai pertimbangan dan pemikiran bahwa:

1. Perpustakaan kecamatan/desa kurang berkembang
2. Masyarakat bawah belum sepenuhnya tersentuh oleh perpustakaan
3. Perpustakaan yang ada cenderung dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke atas
4. Sebagian besar penduduk kita tinggal di pedesaan.

Selama ini keberadaan perpustakaan umum kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, pengelola perpustakaan tidak mau beranjak untuk merubah sistem perpustakaan mereka. Mereka bekerja secara konvensional, menunggu, dan kurang kreatif untuk mengadakan inovasi baru. Padahal perkembangan intelektual masyarakat semakin cepat dan hal ini menuntut dinamisasi perpustakaan.

Perpustakaan selama ini seolah-olah sebagai rumah mati, sunyi, dan ditunggui oleh orang bisu. Kemudian dimana-mana terpampang tulisan-tulisan

yang tidak familier seperti dilarang bicara, harap, tenang, dilarang merokok, dilarang memakai kaos, dilarang mmakai sandal, dan larangan-larangan lainnya. Kalimat-kalimat yang tidak nyaman itu membuat orang enggan masuk ke perpustakaan, karena seolah-olah perpustakaan itu hanya berisi larangan-larangan, meskipun maksud larangan-larangan itu baik.

Konsepsi rumah cerdas ini sebenarnya upaya menciptakan suatu komunitas yang di sana terdapat koleksi (buku, majalah, dan bahan nonkertas) yang mengandung informasi ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan masyarakat setempat. Disamping itu, di lokasi itu terdapat kegiatan-kegiatan yang menuju pada peningkatan kualitas diri sehingga tiap anggota masyarakat mampu berkembang secara intelektual, emosional, dan sosial. Lebih jauh keberadaan rumah cerdas ini diharapkan berfungsi untuk :

1. Menunjang pelajaran sekolah

   Anggota masyarakat terutama anak-anak sekolah dapat pinjam buku-buku di rumah cerdas ini untuk menunjang pelajaran sekolah. Mereka bisa memanfaatkan koleksi rumah cerdas ini sebagai pelengkap perpustakaan sekolah mereka. Sebab fakta menunjukkan bahwa keberadaan perpustakaan seolah tidak diurus sama sekali.

2. Sarana pendorong lahirnya kehidupan baru

   Rumah cerdas ini akan menampung berbgai kegiatan yang akan memotivasi tiap individu masyarakat untuk mengembangkan potens diri dan masyaraat. Untuk itu rumah crdas ini dapat diselenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan, diskusi, pertemuan kerja yang mendorong peningkatan keahlian, ketrampilan, bakat, dan minat warga.

Dengan adanya berbagai macam aktivitas itu, perpustakaan akan mampu menggerakkan potensi masyarakat. Sebab disini terjdi pertemuan antara orang-orag yang berilmu dan mereka yang hasua akan ilmu pengetahuan. Dengan perubahan peran perpustakaan ini, maka diharapkan lahir kehidupan baru dalam masyarakat karena adanya gesekan pemikiran, perilaku, dan pengalaman mereka.

3. Membangkitkan minat masyarakat.

Seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya amnusia, kiranya perlu adanya usaha untuk membangkitkan minat masyarakat. Menghidupkan minat masyarakat ini merupakan upaya membangkitkan semangat baru dalam masyarakat untuk menemukan jati diri dan mengembangkan potesi diri.

Minat merupakan kecenderungan seseorang pada suatu kegiatan atau bidang dan berusaha optimal untuk mengembangkan dirinya dalam bidang itu. Minat yang besar akan menghasilkan karya-karya besar dan untuk mencapainya memang banyak lika-likunya.

4. Memfasilitasi

Keberadaan rumah cerdas ini diharapkan mampu berfungsi sebagai fasilitasi. Yakni mampu menyediakan fasiltas untuk mendorong tercapainya masyarakat yang dinamis, kreatif, percaya diri dan mampu mengembangkan potensi diri.

Di rumah cerdas ini dapat diselenggarakan diskusi dalam berbagai tema atau bedah buku. Untuk itu perlu penyediaan fasilitas yang berupa kegiatan yang dilakukan agar suatu aktivitas dapat berlangsung untuk

mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu ada kerjasama dengan organisasi, narasumber, lembaga swadaya masyarakat, maupun instansi pemerintah.

5. Mendukung pengembangan psikomotorik

Dalam dunia pendidikan dikenal teori bahwa tujuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau dalam bahasa sederhana adalah mengembangkan cipta, rasa, dan karsa. Artinya dalam mencapai tujuan pendidikan tidak hanya pengetahuan, rasa, dan ketrampilan saja yang dikembangkan. Akan tetapi dari hasil cipta dan hasil rasa itu bagaimana caranya agar maujud. Disinilah perlunya mekanisme dan dorongan-dorongan agar anak-anak didik kita memiliki keberanian berkreasi dan berani menunjukkan kreativitas mereka.

Dorongan untuk berkreasi ini dapat didorong oleh lingkungan antra lain melalui rumah cerdas ini. Dorongan-dorongan itu antara lain dengan mengadakan dialog dengan praktisi, pelaku bisnis, psikolog, pengusaha, dan lainnya.

Manajemen Rumah Cerdas

Ide secermelang apapun kiranya tak akan menjadi apa-apa apabila tidak dimenej dengan baik. Artinya ide tinggal ide kalau tidak dicetuskan, tidak ditulis, dan tidak dikembangkan. Demikian pula dengan adanya pemikiran tentang rumah cerdas ini. Kiranya pemikiran ini hanya akan menjadi angan-angan belaka apabila tidak didukung oleh manajemen yang baik.

Mengelola rumah cerdas sebenarnya merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pemilihan strategi, pelaksanaan, dan penilaian hasil-hasilnya. Dalam hal ini tentu saja tercakup pengawasan, pengendalian,

dan pengintegrasian orang-orang yang terlibat dalam kegiatan rumah cerdas ini. Kemudian apabila disederhanakan, manajemen rumah cerdas ini meliputi perencaaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

Prinsip-prinsip Pengelolaan

Suatu perubahan kadang menimbulkan kejutan budaya/shock culture pada masyarakat tertentu. Kadang mereka belum siap mental untuk menerima suatu perubahan. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan pendidikan, kurangnya informasi, kuatnya pengaruh tradisi, dan sempitnya wawasan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan rumah cerdas perlu memikirkan prinsip-prinsip penyelenggaraan yakni; partisipatoris, kemandirian, umum dan terbuka, trnsparan, dan akuntabel.

1. Partisipatoris

Dalam setiap kegiatan memerlukan peran serta aktif beberapa komponen sebagai pendukung kegiatan. Peran serta komponen ini dalam sistem rumah cerdas disebut partisipatoris. Mereka itu tidak sekedar mengajukan usul atau memberikan saran. Partisipatoris ini diharapkan mampu memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan ide, menentukan, memutuskan, mengontrol, maupun menikmati hasilnya. Mereka itu bisa terdiri dari pengelola, relawan, anggota, sponsor, dan pengguna.

2. Kemandirian

Penyelenggaraan rumah cerdas dan seluruh kegiatannya dilaksanakan secara mandiri. Kemandirian ini daam arti tidak tergantung pada suatu lembaga atau yayasan apapun. Namun demikian dalam operasionalnya dapat dibantu oleh berbagai kalangan tanpa ikatan apapun, termasuk ikatan politik.

3. Umum dan Terbuka

Kegiatan yang diselenggarakan oleh rumah cerdas ini ditujukan untuk semua anggota komunitas, baik masyarakat maupun komunitas khusus. Artinya pelayanan ini harus seimbang untuk berbagai kategori masyarakat seperti anak, dewasa, laki-laki, perempuan, sehat,penyandang cacat, ibu hamil, maupun lansia.

4. Transparan

Makna trasparan semula adaah tembus pandang. Dalam hal ini pengelolaan yang transparan berarti cara pengelolaan yang tidak saja betul menurut prosedur, tetapi juga benar menurut ukuran moral. Dengan prinsip ini, pengelola rumah cerdas ini memiliki kewenangan yang secara berkala dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan terutama yang berkaitan dengan pendanaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun moral melalui pihak tertentu yang memang memiliki kewenangan dalam hal ini.

Manajemen Sumberdaya Manusia

Manajemen sumberdaya manusia dalam arti ini adalah serangkaian upaya pengintegrasian orang-orang yang terkait ke dalam tugas, kewajiban, wewenang, dan hak yang sesuai di suatu lembaga/organisasi. Adapun sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan rumah cerdas ini antara lain adalah pengelola, relawan, dan anggota aaktif dan nonaktif.

Pengelola dalam hal ini adalah sejumlah orang yang melaksanakan tugas secara penuh atau paruh waktu/part time, bertanggung jawab secara administrasi maupun operasional terhadap pengelolaan rumah cerdas ini. Mereka itu direkrut berdasarkan kriteria tertentu dan terikat dengan komitmen

tertentu. Untuk itu mereka berhak memperoleh sekedar imbalan sesuai kemampuan rumah cerdas dan mereka memiliki kewenangan yang dapat dipertanggungjhawabkan.

Relawan adalah orang orang yang dengan ikhlas secara sukarela bersedia memberikan tenaga, waktu, dan keahlian maupun ketrampilannya untuk tugas-tugas tertentu. Mereka itu direkrut dan dalam penugasan dapat ditugaskan secara penuh maupun paruh waktu/part time.

Adapun anggota dalam pengertian ini adalah orang-orang yang secara resmi mencatatkan diri sebagai anggota rumah cerdas karena telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mereka memiliki hak dan kewajiban tertentu yang bersifat mengikat. Sedangkan pengguna non anggota adalah perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan fasilitas atau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh rumah cerdas secara situasional. Mereka itu memang tidak tercatat sebagai anggota aktif pada rumah cerdas tersebut.

Penganggaran

Penganggaran atau bisa jugha disebut dengan manajemen keuangan merupakan upaya pengadaan, pengaturan, alokasi, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dalam rangka pengelolaaan sumberdaya manusia, pelayanan, dan pengembangan perpustakaan umum menjadi rumah cerdas.

Mengingat kegiatan rumah cerdas ini dapat dikategorikan sebagai unit kerja berskala kecil, maka dalam sistem penganggaran dapat dibuat prosedur dan pelaksanaan yang sederhana. Prosedur ini secara sederhana cukup meliputi kegiatan budgeting, pembukuan, dan pelaporan.

1. Budgeting

Kegiatan ini meliputi:

a.Mengidentifikasi berbagai jenis kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan dana

b.Mengidentifikasi sumber-sumber dana

c.Menyesuaikan kegiatan dengan kesediaan dana

d.Menyusun skala prioritas

e.Melembagakan sistem penggalian dana

f.Mendokumentasikan rencana dan pelaksanaan keuangan

Pembukuan

Kegiatan pembukuan ini meliputi:

1. Seleksi dan penetapan sistem pembukuan yang akan digunakan
2. Melakukan aktivitas pembukuan disertai berbagai bukti yang diperlukan
3. Melakukan kontrol internal

Pelaporan

Kegiatan pelaporan ini meliputi:

4. Menyusun laporan keuangan secara berkala
5. Menerbitkan dan menyebarkan laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait
6. Melakukan telaah perkembangan dan kemajuan yang terkait dengan keuangan

Daftar Pustaka

- Coca-Cola Foundation Indonesia. 2004. *Mengelola Sumber Daya Rumah* Belajar Jilid 1 – 4. Jakarta: Coca-Cola Foundation Indonesia dan Yayasan Taimiyah
- *Ensikopedi Nasional Indonesia.* 1990. Jakarta: PT Nuansa Pustaka Utama

- Lasa Hs.. *Manajemen Perpustakaan.* Yogyakarta: Gama Media (dalam proses penerbitan)

- ---------. 1998. *Kamus Istilah Perpustakaan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Perpustakaan Nasional RI. 1999.*Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Umum.* Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

- Robbins, Stephen. 1994. *Teori Organisasi, Struktur, Desain, dan Aplikasi.* Jakarta: Arean.

- Salusu, J. 2000. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik* dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: Grassindo

- Sulistya-Basuki. 1993. *Pengantar Ilmu Perpustakaan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- *Surat Keputusan MENPAN No. 132 tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustaakawan dan Angka Kreditnya.* Jakarta: MENPAN

- Timpe, A. Daale. 1990. *Kepemimpina/leadership.* Jakarta: PT Elex Media.